

KAJIAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN PINRANG

Nasriah Akil *)

Abstract : Regional economic development is largely determined by the level of economic activity based on economic sectors that encourages an increase in Gross Domestic Product and the strengthening of regional economic structure, Optimization of the economic potential of the region is highly dependent on the level land ready kesesuaian subsectors in each sub-sector is the basis sectors that have a commodity that is considered superior in every sub-district that was dilahan either wet or on dry land, the potential for regional economic development is not only supported by the agricultural sector which is considered the base, however, supported by the development sector as a basis for encouraging the economic activities based districts, Strarategi and regional economic development policy is supported by a strategic program that will be described at the level SKPD and other entities related to the economic development of the region.

Keywords: Master Plan and Economic Development

PENDAHULUAN

Selama lebih dari tiga dekade Indonesia telah mencoba melakukan transformasi struktur perekonomian nasional, yaitu dari perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian yang relatif stagnan menjadi perekonomian yang berbasis industri yang maju secara progresif. Transformasi ini diharapkan akan dapat direalisasikan melalui pelaksanaan strategi pembangunan yang berlandaskan pada pembangunan industri yang didukung oleh pembangunan pertanian.

Pada kenyataannya proses industrialisasi yang diadopsi dari teori Arthur Lewis ini ternyata gagal dalam melakukan transformasi struktur perekonomian nasional. Selain itu pula sejak krisis moneter tahun 1997 ternyata kondisi perekonomian menjadi sangat buruk, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin bertambah.

Kegagalan dalam implementasi strategi pembangunan nasional, telah menimbulkan dampak terhadap sektor pertanian yaitu pertama, bertambahnya beban sektor pertanian, karena harus menampung limpahan tenaga kerja dari sektor industri dan perkotaan. kedua, membuka kesadaran berbagai pihak bahwa

pembangunan nasional harus didasarkan pada sektor pertanian.

Berdasarkan fakta ini maka pembangunan pertanian harus menjadi lokomotif perekonomian nasional. Dengan tumbuhnya kesadaran berbagai pihak, pendekatan sistem dan usaha agribisnis telah membuka wawasan dan pemahaman secara luas sebagai suatu strategi yang tepat dalam menempatkan sektor pertanian sebagai “driving force“ untuk membangkitkan kembali roda perekonomian nasional.

Salah satu strategi penting yang diperkenalkan pemerintah dan dapat diimplementasi secara nyata terutama di Propinsi Sulawesi Selatan adalah pembangunan sektor ekonomi dengan andalan utama sektor pertanian dalam arti yang luas. Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah lumbung pangan andalan Sulawesi Selatan dan berusaha semakin berbenah diri melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah. Dengan kata lain potensi ekonomi daerah utamanya sektor unggulan menjadi skala prioritas utama dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah baik pada masa kini maupun pada masa datang. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Pinrang

diarahkan pada pencapaian tujuan: 1) Peningkatan pendapatan perkapita, 2) percepatan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi kearah yang lebih sehat dan dinamis, 3) Percepatan dan penyediaan kesempatan kerja yang cukup, 4) Pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan serta pengurangan perbedaan dan kesenjangan dalam tingkat perkembangan antar wilayah.

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dengan batasan diatas, maka pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan rill perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama.

Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya ditentukan berdasarkan dimensi pembangunan, yakni tergantung pada fokus dan orientasi pembangunan yang dilaksanakan dan dimensi mana yang lebih menjadi yang lebih menjadi perhatian bersama baik pengambil keputusan dan para perencana, para pelaksana pembangunan maupun masyarakat pada umumnya sebagai sasaran pembangunan.

Dimensi keberhasilan pembangunan kemudian diberi indikator dari berbagai dimensi pembangunan kemudian dijadikan tolak ukur atau ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan (Fatah,2006). Pengukuran keberhasilan pembangunan menurut Fatah (2006) harus melewati dua tahap, yaitu 1) Tahapan identifikasi target pembangunan dan 2) Tahapan agregasi karakteristik target pembangunan. Pada tahapan identifikasi target pembangunan adalah menentukan secara jelas siapa yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan

dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dinikmati oleh mereka yang lebih berhak. Pada tahapan agregasi karakteristik target pembangunan diperlukan untuk menjaga agar ketika skala kegiatan pembangunan diperluas, target yang dituju tetap memenuhi karakteristik dan kriteria yang ditetapkan pada tahap identifikasi.

Ukuran keberhasilan pembangunan yang lain adalah dengan pendekatan pengentasan kemiskinan, yaitu bahwa keberhasilan pembangunan diukur dengan seberapa jauh upaya-upaya pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan. Ukuran kemiskinan itu sendiri cukup bervariasi, namun pada umumnya semua berlandaskan pada kerangka berpikir bahwa ada tingkat atau level tertentu yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk hidup secara layak, dan dapat beraktivitas memperbaiki taraf kehidupannya secara bebas dan mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain.

Menurut Kuncoro (2004) bahwa teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah secara tuntas dan konprehensive. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pembangunan ekonomi daerah peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator (Blakely,1989; Kuncoro,2004).

1. Wirausaha.

Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usahabisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat

dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Pantai, jalan raya, dan pusat hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk dapat menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya. Peran koordinator dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi seperti, tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerjasama dengan lembaga pemerintah, badan usaha dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan dan strategi ekonomi.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berbeda dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya. Adanya tujuan yang jelas juga memberikan dasar berpijak untuk penentuan program-program yang lain.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas yang dapat disediakan untuk menarik pengusaha untuk masuk, misalnya dengan menyediakan bangunan-bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha dengan penarikan biaya sewa pada tahun pertama. Dalam bidang kepariwisataan, pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di obyek wisata tertentu.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto (PDB) produk nasional bruto (PNB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun demikian, pada umumnya para pakar ekonomi memberikan pengertian yang sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan PDB/PNB saja.

Teori Harrod Domar lebih menekankan analisisnya pada syarat-syarat yang dipenuhi oleh suatu negara dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil (steady growth) dalam jangka waktu yang panjang. 1) Keadaan barang dan modal yang sudah mencapai kapasitas penuh, 2) Keadaan tabungan yang sebanding atau proporsional dengan pendapatan nasional, 3) Keadaan ratio modal produksi (Capital output ratio) yang tetap.

Friedman dalam Triyuwono dkk, (2003) mengemukakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinyu tetapi bersipat kumulatif

yang berasal dari sejumlah kecil pusat, serta perubahan yang terletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi.

Pendekatan dan Metode Inovatif dalam Riset Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan sebuah riset perencanaan dalam pengelolaan potensi sumberdaya. Untuk itu dalam implementasinya perlu pengetahuan tentang pendekatan-pendekatan yang layak dan umum digunakan, yaitu:

- Pendekatan keterpaduan (*integrated*)
- Pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat (*participatory and community empowerment*)
- Pendekatan kemitraan (*partnership*)
- Pendekatan keberlanjutan (*sustainability*).

Melalui penerapan pendekatan-pendekatan tersebut, pentahapan kegiatan yang akan dilaksanakan akan diorientasikan guna meminimalkan beberapa kelemahan, antara lain seperti: 1) Perencanaan dan pengelolaan yang tidak terpadu; 2) Ketidaktersediaan data dan informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan; 3) Tidak transparannya kebijakan perencanaan alokasi pemanfaatan sumberdaya; dan 4) Kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya. Kelemahan-kelemahan tersebut merupakan penyebab tidak optimalnya pengelolaan sumberdaya pada umumnya.

Beberapa metode yang sejalan dengan prinsip pengelolaan dan pendekatan-pendekatan dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Metode Analisa Kebijakan Strategis dengan Teknik SWOT, cukup tepat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya strategis. Kunci keberhasilan penggunaan metode ini adalah kemampuan menentukan elemen-elemen masalah yang dihadapi.

- 2) Metode Analisa Geografis, bertujuan untuk mengetahui keadaan geofisik dan potensi SDA secara spasial. Metode ini sangat tepat digunakan untuk analisa pengembangan wilayah yang membutuhkan keterpaduan (terintegrasi) karena kemampuannya dalam melakukan teknik *overlay* antara beberapa kriteria kesesuaian pemanfaatan lahan.

Metode Tipologi; yang cukup berguna dalam menentukan jenis pemanfaatan lahan yang merupakan bagian dari sumberdaya yang perlu dioptimalkan pengelolaannya. Selain itu, hasil terapan metode ini mampu menjadi acuan pembangunan tiap bagian dari wilayah yang sesuai dengan peruntukannya.

Metode Pendekatan Survey

Dalam penyusunan Masterplan Pembagunan Ekonomi Daerah Kabupaten Pinrang, diperlukan data dan informasi yang akurat. Untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan maka pelaksanaan survey harus dilakukan dengan baik. Dalam metode pendekatan survey dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pendekatan dengan tujuan untuk mengcover semua data dan informasi yang dibutuhkan.

Teknik pendekatan Survey

a. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang komprehensif, yaitu menelaah sebuah fenomena secara utuh. Konsep utama tentang dinamika sistem adalah bagaimana semua objek dalam suatu sistem saling berinteraksi satu dengan lainnya. Objek dan orang dalam sistem saling berinteraksi dalam *loop* "sebab-akibat", di mana perubahan satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya dalam kurun waktu ke depan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi variabel aslinya.

b. Pendekatan Historis atau Pendekatan Kronologis

Dimensi sejarah mempunyai peran yang sangat penting sebab dapat menjelaskan dimensi waktu, pertumbuhan, dan perkembangan suatu daerah. Pendekatan ini digunakan untuk menyusun kronologis pertumbuhan dan perkembangan daerah dari waktu ke waktu, sehingga trendnya dapat terlihat.

c. Pendekatan Keruangan (*Spatial Approach*)

Pelaksanaan pendekatan keruangan berdasarkan prinsip-prinsip geografis yaitu penyebaran, interelasi, dan diskripsi. Pendekatan keruangan dalam hal ini menyangkut pendekatan topik, aktivitas manusia, dan regional.

d. Pendekatan Ekologi (*Ecological Approach*)

Pendekatan ekologi adalah suatu metodologi untuk mendekati, menelaah dan menganalisis suatu gejala atau masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Pandangan dan penelaan ekologi diarahkan kepada hubungan antara manusia dengan makhluk hidup dengan lingkungan alam, yang dapat mengungkapkan masalah hubungan penyebaran dan aktivitas manusia yang merupakan bentuk ekosistem hasil penyebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungannya. Pendekatan ekologi merupakan metode pendekatan pelengkap untuk melakukan pendekatan masalah yang tidak dapat didekati atau ditelaah oleh metode-metode lainnya.

daerah yang didasarkan pendekatan kewilayaan dan keunggulan daerah dari potensi ekonomi yang dimiliki, maka dalam pengembangannya diarahkan pada pola pengembangan terpadu, sinergis dan integratif didalam melakukan perencanaan stratgis suatu daerah. Karena itu beberapa hal penting untuk menjadi acuan pemerintah dalam pengembangannya sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi daerah disesuaikan dengan Rencana Tataruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di arahkan pada Pola Kesatuan Pengembangan Terpadu (PKPT) yakni pengembangan komoditi unggulan yang sama pada wilayah pengembangan yang sama. Dengan seperti itu, sangat memungkinkan terciptanya optimalisasi potensi ekonomi secara efektif, efisien dan pada akhirnya meningkatkan skala ekonomi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, baik untuk kepentingan ketahanan pangan maupun kebutuhan peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat setempat;
2. Sinergi antara wilayah kecamatan yang dianggap basis dengan non basis. Dengan sinergi yang kuat dapat memudahkan kesatuan pengembangan potensi masing-masing, sehingga wilayah kecamatan yang dianggap non basis pada komoditi yang dihasilkan dalam waktu perencanaan akan berubah menjadi wilayah kecamatan yang menghasilkan komoditi yang unggul;
3. Integrasi perencanaan pembangunan dengan pola pengembangan potensi ekonomi pada sub sektor ekonomi pada komoditi tertentu diarahkan pada dua pola pengembangan yakni pola pengembangan komoditi yang dihasilkan untuk kebutuhan pangan dan ketahanan pangan dengan pengembangan subsektor komoditi lahan basah terutama yang dihasilkan dari subsektor perikanan dan kelautan, kebijakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah

Berkaitan dengan pendekatan teori dalam pengembangan ekonomi daerah menekankan pada pengembangan ekonomi

pengembangannya diarahkan pada penciptaan iklim investasi mendorong peningkatan ekspor yang selama ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun diperlukan efisiensi untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dan daya saing komoditi yang dihasilkan dapat bertahan dalam menghadapi tantangan eksternal;

4. Penguatan sektor-sektor ekonomi sangat penting tidak hanya sekedar dilihat dari peran sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, yang lebih bersifat makro, tetapi yang lebih penting adalah penguatan struktur ekonomi yang didukung oleh pengembangan industri berbasis pertanian. Karena itu arah pengembangan penguatan struktur ekonomi dibutuhkan penguatan kelembagaan ekonomi dan sentuhan teknologi, serta pengembangan klaster industri berbasis pertanian pada setiap kecamatan yang dianggap basis dan maupun non basis. Selain itu dukungan permodalan usaha, akses pasar, pengembangan SDM dan pola kemitraan. Dengan pendekatan keterpaduan, dan sinergitas antara lembaga yang saling menguntungkan dapat mendorong pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi lebih cepat dan kuat;
5. Pengembangan sentra-sentra produk unggulan wilayah untuk kemudian dikembangkan kearah pengelolaan yang dapat menciptakan nilai tambah (VA). Salah satu instrumen penting dalam peningkatan nilai tambah tersebut hanya dapat dicapai jika didukung infrastruktur dan teknologi, sehingga memudahkan untuk dikembangkan kearah pengelolaan agribisnis dan agroindustri. Hal ini sangat penting mengingat prospek sektor yang dianggap unggul tersebut memiliki pasar yang cukup potensial, baik di pasar regional maupun internasional;
6. Arah pengembangan sektor unggulan tersebut sangat memungkinkan untuk membentuk sebuah Kawasan Pengem-

bangkan Ekonomi Berbasis Masyarakat (KAPEM) di atas setingkat sentra-sentra komoditi unggulan yang ada yakni dengan melalui pendekatan keruangan dan homogenitas komoditi pada suatu wilayah yang saling mendukung. Dengan demikian setiap sentra pada wilayah pengembangan komoditi unggulan dengan kecamatan yang berbeda dan komoditi yang sama akan diarahkan pada pola pengembangan ekonomi masyarakat agrobisnis/agroindustri masing-masing. Pola pengembangan seperti ini tidak hanya memberi nilai tambah yang cukup meyakinkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga didukung oleh penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan pola kemitraan. Dukungan yang lain adalah memberi ruang tertentu pada pelaku bisnis lain pada wilayah masing-masing untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut terutama yang berkaitan dengan aspek pembibitan rakyat, teknologi rakyat dan kelompok ekonomi yang kuat, serta dukungan kelembagaan permodalan dan SDM yang tersedia.

7. Pengembangan sektor Unggulan yang berada pada daerah basis dengan komoditi yang dihasilkan. Dengan skenario 1 (satu) dan Ke 2 (dua) mendapat dukungan dari pemerintah, maka arah pengembangan ekonomi daerah Kabupaten Pinrang berhasil menguatkan struktur ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah yang pada ujungnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang menggali pengikatan secara signifikan.
8. Pengembangan sektor yang dimaksudkan lebih mengarah pada strategi penguatan sektor dengan menganut pola keterkaitan sektor yang kuat, artinya pengembangan sektor tersebut diharapkan kebijakan memiliki keterkaitan kedepan yang kuat (forward linkage).

Kebijakan Strategis

Strategi kunci yang mesti dikedepankan adalah :

1. Optimalisasi potensi sektor basis dan komoditi yang dihasilkan pada setiap kecamatan dengan pengelolaan sektor unggulan tersebut secara profesional dan proposional dengan tingkat efisiensi yang tinggi mendukung daya saing komoditi unggulan.
2. Pengembangan ekonomi daerah dengan sektor unggulan yang ada juga sekaligus memperkuat kutub pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan yang dikategorikan sebagai wilayah basis. Kemudian akan tercipta multiplier effect terhadap berbagai kegiatan eksternal yang menguntungkan bagi masyarakat yang ada di sektor non basis, namun jika dikembangkan wilayah dimana sektor dan komoditi non basis itu dimasa depan kemungkinan non basis itu akan berubah menjadi wilayah basis dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan.

Arah Kebijakan dan Program Pengembangan Ekonomi Daerah

Berdasarkan potensi ekonomi yang ada, dan analisis potensi ekonomi tersebut, maka dalam pengembangannya dapat di arahkan pada pola pengembangan yang terpadu melalui program pengembangan ekonomi daerah dalam kurun waktu perencanaan sebagai berikut :

1. Program optimalisasi potensi ekonomi
2. Program penguatan struktur ekonomi
3. Program Peningkatan daya saing Komoditi Unggulan
4. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi
5. Program Pengembangan Sinergitas Antara Wilayah

Arah kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi potensial, akan terwujud sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam Dokumen. Dalam Dokumen ini akan dijabarkan pokok program sebagai berikut :

Tabel 1. Program Pengembangan Ekonomi Daerah

No.	Program	Tujuan	Rencana Tindak	Indikator Capaian
1.	Optimalisasi Potensi Lokal berbasis keunggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Potensi Sumber daya Ekonomi Daerah yang berbasis keunggulan; 2. Mengoptimalkan sektor-sektor unggulan yang berpotensi tinggi pada setiap kecamatan; 3. Mengembangkan kecamatan yang memiliki komoditi yang diunggulkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi dan revitalisasi sektor unggulan; 2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya investasi mendorong sektor ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya skala ekonomi dan Nilai Tambah dengan tingkat efisiensi ekonomi yang tinggi.; 2. Terciptanya peluang investasi mempercepat pertumbuhan sektor unggulan.
2	Program Penguatan Struktur Ekonomi	Menciptakan pergeseran sektor ekonomi dan peran ekonomi terhadap peningkatan PDRB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan keterkaitan sektor ekonomi mendorong sektor unggulan didukung dengan sektor-sektor lain; 2. Menjadikan sektor non basis pada tahun tertentu menjadi sektor basis; 3. Pengembangan sektor industri dan jasa yang berbasis pertanian dan mengembangkan sektor pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri. 	Tercapainya penguatan struktur ekonomi berbasis keunggulan

3	Peningkatan Daya Saing Komoditi unggulan	Menciptakan komoditi unggulan, tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan daya saing yang tinggi baik pasar domestik maupun pasar internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing melalui sentuhan teknologi, pengembangan SDM dan efisiensi dalam pengelolaannya; 2. Membentuk pusat informasi Bisnis pada setiap daerah tujuan ekspor dan pengembangan daya saing komoditi berbasis IT; 3. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan inovasi fokus pada difersifikasi produk. 	Tercapainya tingkat daya saing komoditi unggulan daerah dan bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif
4	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Daerah	Menciptakan kelembagaan ekonomi yang profesional dan kuat dalam mengelola potensi sumberdaya ekonomi dan pelaku bisnis lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengelola kelembagaan ekonomi masyarakat, Koperasi dan UMKM; 2. Membentuk pusat pelayanan UMKM; 3. Peningkatan dan penguatan kelompok ekonomi masyarakat Pemebrian regulasi dan pembiayaan sesuai dengan kemampuan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lembaga ekonomi yang profesional; 2. Meningkatnya pelayanan dibidang pengembangan ekonomi masyarakat berbasis K-UMKM; 3. Adanya regulasi dan pembiayaan untuk menstimulasi bangkitnya ekonomi masyarakat;
5	Sinergi antara wilayah Pengembangan	Mesinergikan wilayah yang bukan basis dengan basis untuk membentuk Wilayah pengembangan ekonomi fokus pada komoditi unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk model pengembangan ekonomi pada areal lahan basa dan lahan kering dalam suatu kesatuan ekonomi mendorong kegiatan ekonomi yang sinergis; 2. Meningkatkan hubungan komunikasi bisnis anantara wilayah, daerah dan kawasan; 3. Mengsinergikan kecamatan yang masuk dalam kategori basis dengan non basis Dan kesatuan komoditi basis pada wilayah yang sdama atau wilayah bertetangga untuk meningkatkan kesatuan ekonomi dan aksesibilitas yang tinggi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuk model ekonomi terpadu antara kecamatan berbasis dengan tidak berbasis; 2. Terjalannya sinergi antara kecamatan, kawasan dan wilayah hinterland untuk membangun ekonomi bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pengembangan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh tingkat aktivitas ekonomi berdasarkan sektor-sektor ekonomi mendorong terciptanya

- peningkatan PDRB dan penguatan struktur ekonomi daerah;
2. Optimalisasi potensi ekonomi daerah sangat tergantung oleh tingkat kesesuaian lahan pada siap subsektor yang berada di setiap kecamatan;
3. Sektor basis adalah sektor yang memiliki komoditi yang dianggap unggul pada setiap kecamatan baik

- kecamatan yang berada dilahan basah maupun di lahan kering;
4. Pengembangan potensi ekonomi daerah tidak hanya didukung oleh pertanian yang dianggap sektor basis, namun di dukung oleh pengembangan sektor non basis untuk mendorong secara bersama kegiatan ekonomi masyarakat berbasis kecamatan;
 5. Strarategi dan arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah sangat didukung oleh program strategis yang akan dijabarkan pada tingkat SKPD dan badan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, H (2004), " *The US Farm Bill and Cotton Cultivation: Is the WTO undermining Rural Development?*", *Agriculture and Rural Development*, 11 (2)
- Anonim. 2008-2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Citra Umbara, Bandung.
- Asdar, Muhammad, 2008. Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah dalam Rangka Pengembangan **Komoditi** Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sulawesi Selatan
- Biro Kredit Bank Indonesia, (2002), "Penelitian Pola Pembiayaan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil **Pasca** UU BI No. 23 tahun 1999," Laporan Penelitian, Bank Indonesia: Jakarta
- BPS-Bappeda Sul-Sel, Sulawesi Selatan Dalam Angka, Berbagai Terbitan 2006-2011, Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan: Makassar.
- BPS., 2006-2011. Kabupaten Pinrang dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Pinrang .
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, (2001), "Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis," Bank Indonesia: Jakarta.
- Eales Rob, (1997), "Credit Risk Measurement in Corporate Banking: Theory and Practice," Reserve Bank of Australia Bank, Supervision Department
- Edward M., Jr. H. (1993), Ownership structure, Strategy, and Growth of Small Firm: an agency Perspective. Dissertation Abstracts, UK. P. 1008.
- Hidayat, Agus, (2006), "Skim Pembiayaan bagi Pengembangan Pertanian dan Perikanan," Paper Dipresentasikan pada Seminar Regional dan Diskusi Terfokus, ISEI. Makassar.
- Keputusan Bupati Takalar No. 182 tahun 2002 Tanggal 8 Agustus 2002 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUPERTA TA 2002.
- Kesepakatan Bersama Antara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No.15/KEP/MENKO/KESRA/VI/2005–No. 7/31/KEP.GBI/2005
- Levy, Brian, (1993), "Obstacles to Developing Indigenous Small and Medium Enterprises: An Empirical Assessment," World Bank Economic Review 7(1).

- Madris, dkk., 2007. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Pengambilan serta Pengembalian Kredit Perbankan di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- , 2008. Kegiatan Pendampingan Pembinaan Sentra IKM Pertenunan Sarung/Kain Sutra Mandar, Sulawesi Barat.
- ., 2008. Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan.
- ., 2009. Pemetaan Potensi Ekonomi dan Peluang Investasi di Kota Parepare.
- ., 2010. Analisis Pengembangan Komoditi Unggulan Di Kabupaten Pinrang.
- Maupa, Haris, (2004), "Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Usaha Kecil di Sulawesi Selatan," Disertasi Doktor Ekonomi, PPS-UNHAS (tidak diterbitkan): Makassar.
- Navajas, Ruiz Alvaro, (2001), "Credit Guarantee Schemes: Conceptual Frame," Financial System Depeloment Project, GTZ/FONDESIF.
- Perjanjian Kerjasama antara PEMDA Kota Pare-Pare dengan BPD Sulsel Cabang Pare-Pare No. 7/KB/VIII/2003; No. KK/01/PR/2003 tentang Penyempurnaan Penyaluran Dana Avalis Pola Executing dan Chanelling PEMDA Kota Pare-Pare.
- Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan BPD Sulsel Cabang Gowa No. 580/034/EKONOMI tentang Penyaluran Dana Avalis Pemerintah Kabupaten Gowa.
- Perjanjian Kerjasama Tentang proyek Penyaluran Dana Penguatan/Pengembangan Modal Usaha TA 2002, No. 180/111/435.110/2002.
- Retnadi, Djoko, (2006), "Arah Penyaluran Kredit Pasca Pakjan BI 2006," Economic Review No. 2003, Maret 2006
- Robinson, M.S. (2004), The Microfinace Rovolution, Vol 1-3 (Sustainable Finace for the Poor; Lesson from Indonesia; Emerging Industry, Washington, D.C, The Word Bank.
- Tambunan, Tulus T.H, (2002), "Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Salemba Empat: Jakarta
- Todaro, M.P. (1995), Economic Development in The Third World, 3rd edition, Longmem Inc: New York.
- Undang-undang No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Untoro, (2004), "Default Risk dan Penjaminan Kredit UKM," Bank Indonesia Working Paper WP/01/PPSK/05, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia: Jakarta.
- Yunus, M., (2006), Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan Di Sulawesi Selatan.

***) Penulis adalah Dosen STIM LPI Makassar.**

